

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Pemerintah Kota Kendari

Ijong¹, Ibnu Hajar², Muh Nur³, Ummy Kalsum⁴

^{1,2,3,4}, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

ijong@gmail.com

ABSTRACT

Sistem Anggaran Sektor Publik dalam pengembangannya telah menjadi instrumen kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Proses penentuan kebijakan dalam sektor publik melibatkan seluruh komponen masyarakat, untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas, yang terdiri atas anggota dewan, organisasi sosial dan politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, yayasan dan masyarakat umum. Lokasi penelitian ini adalah Pemerintah Kota Kendari. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BKAD Kota Kendari. Sedangkan data sekunder lainnya yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan merujuk pada literatur-literatur, jurnal dan berbagai informasi lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data adalah Analisis data Kuantitatif menggunakan menggunakan metode perhitungan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Teknik analisis dibatasi hanya dengan menggunakan analisis Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada Pemerintah Kota Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas pada pengelolaan anggaran tahun 2017 sampai 2019 menunjukkan hasil dengan kriteria cukup efektif, kemudian tahun 2020 memenuhi kriteria efektif dan tahun 2021 memenuhi kriteria cukup efektif. Hasil analisis dari segi efisiensi tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2018, kemudian tahun 2019 hasil perhitungan menunjukkan kriteria efisien, tahun 2020 menunjukkan hasil cukup efisien dan tahun 2021 menunjukkan hasil efisien.

Keyword: Efektivitas, Efisiensi, Anggaran Pemerintah

Article Info

Article History

Received : March 12th, 2023

Revised : Mey 14th, 2023

Accepted : June 3rd, 2023

Published : Agustus 22nd, 2023

Copyright © 2023 by the author



PENDAHULUAN

Kinerja keuangan yang baik merupakan upaya dalam rangka peningkatan perekonomian suatu daerah. Soraida (2022) menyebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggambarkan kemampuan daerah dalam memenuhi daerah masing-masing melalui Pendapatan Asli Daerah dan ditopang oleh dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Rahmayati (2016) mengungkapkan bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya di bidang keuangan. Kinerja keuangan sangat penting dalam mendukung sasaran dan tujuan program dalam strategi planning. Keuangan daerah dikelola melalui tata kelola dan manajemen keuangan daerah. Menurut Halim (2014), keuangan daerah yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang meliputi tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang dikenal dengan akuntansi keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara efisien, ekonomis, dan efektif atau memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi (Mardiasmo et al., 2018).

Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan 3 tahun terakhir ini, tapi peningkatan cenderung berfluktuasi. Sumawan dan Sukartha (2016) berpendapat bahwa peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi setiap tahunnya menunjukkan pula tingginya sumber keuangan yang dimiliki daerah. Jika sumber keuangan yang dimiliki tersebut mampu dimanfaatkan dan dikelola dengan optimal maka memberikan cerminan kinerja dari pemerintah daerah. Potensi-potensi yang dimiliki daerah diharapkan agar mampu dimanfaatkan dengan baik agar sumber keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah dapat meningkat. Tuntutan agar pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah disebabkan karena saat ini kewenangan pemerintah pusat lebih banyak dilimpahkan kepada daerah (Julitawati, 2016).

Hal yang menarik juga terkait permasalahan mengenai penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rusdi (2018) yang relevan dan dijadikan sebagai pembanding dalam penelitian ini yaitu dengan judul "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Kendari", dengan hasil penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kendari mengenai Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menunjukkan bahwa kinerja pendapatan belum mencapai target namun termasuk kategori efektif hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah yang terealisasi dengan yang dianggarkan. Sedangkan kinerja belanja pemerintah Kota Kendari dinilai mampu menghemat anggaran belanja dengan sangat efisien. Hal ini terlihat dari tidak adanya angka Realisasi yang melebihi anggaran yang ditargetkan. Namun Rusdi (2018) juga menyatakan masih ada kekurangan yang perlu dibenahi, masalah kinerja pendapatan yang belum mencapai target. Pemerintah Kota Kendari harus lebih berusaha lagi dalam meningkatkan penghasilan asli daerah

(PAD) melalui pendapatan pajak dengan memaksimalkan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) serta mengembangkan potensi-potensi baru yang ada di daerah Enrekang.

Pada Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran, Mardiasmo (2018:61). Sedangkan menurut Wiratna (2015:28) anggaran adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan segala aktivitas dan kegiatan organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang dibuat secara tepat dan cermat berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu satu periode (Erna wijaya: 2015). Anggaran yang telah disusun akan digunakan oleh pihak manajemen untuk mengarahkan jalannya kondisi organisasi atau perusahaan agar berjalan dengan baik dan lancar. Mardiasmo (2018:98) menjelaskan bahwa anggaran adalah suatu pekerjaan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggitingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan Negara pada masa depan dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan diterima dalam masa tersebut. Anggaran merupakan dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja (Halim dan Kusufi 2016:48). Anggaran tersebut digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan rencana pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja sebagai alat memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua dari berbagai unit kinerja.

Berdasarkan Anggaran dalam akuntansi berada di ruang lingkup akuntansi manajemen. Mardiasmo (2018) mengidentifikasi beberapa fungsi anggaran dalam manajemen sektor publik adalah sebagai berikut :

1. Anggaran sebagai alat Anggaran Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa anggaran merupakan alat Anggaran manajemen untuk mencapai tujuan organisasi sehingga organisasi akan tahu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat Anggaran, digunakan untuk:
 - a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan;
 - b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta alternatif pembiayaannya;
 - c. Mengalokasikan dana pada berbagai program kegiatan yang telah disusun;
 - d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (overspending), terlalu rendah (underspending), salah sasaran (misappropriation) atau adanya

penggunaan yang tidak semestinya (*misspending*). Anggaran merupakan alat untuk mengawasi kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Sebagai alat pengendalian manajerial anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Pengendalian anggaran sektor publik dapat dilakukan dengan empat cara yaitu :

- a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan;
 - b. Menghitung selisih anggaran (*favourable* dan *unfavorable variances*);
 - c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians;
 - d. Merevisi standar biaya untuk target anggaran untuk tahun berikutnya.
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal Melalui anggaran organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah, digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi.
 4. Anggaran sebagai alat politik Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik, sebagai bentuk komitmen eksklusif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tertentu. Para manajer publik perlu pemahaman tentang manajemen keuangan sektor publik yang memadai serta anggaran tidak sekedar alat teknik melainkan diperlukannya keterampilan berpolitik (*political skill*), membangun koalisi dan keahlian bernegosiasi. Oleh karena itu, kegagalan dalam melaksanakan anggaran akan dapat menjatuhkan kepemimpinan dan kredibilitas pemerintah.
 5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi Sebuah bagian unit kerja atau departemen yang merupakan sub-organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya melalui dokumen anggaran yang komprehensif. Oleh karena itu, anggaran dapat digunakan sebagai alat koordinasi dan komunikasi antara dan seluruh bagian dalam pemerintahan.
 6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja Pencapaian target anggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran merupakan penilaian kinerja eksklusif. Tingkatan hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan merupakan penilaian kinerja manajemen publik. Anggaran merupakan alat efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Anggaran sebagai alat motivasi Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan maka alat yang dapat digunakan salah satunya adalah anggaran. Selain dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*. Hendaknya anggaran jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai, namun jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik Fungsi ini hanya berlaku pada organisasi sektor publik, karena

pada organisasi swasta anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup oleh publik. Elemen-elemen yang harus terlibat dalam penganggaran publik masyarakat dan elemen masyarakat lainnya non pemerintah, seperti LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, dan Organisasi masyarakat lainnya. Keterlibatan mereka dapat bersifat langsung di mana masyarakat dalam proses penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan Anggaran pembangunan maupun rencana kerja pemerintah (daerah) sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dapat melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif (DPR/DPRD). Beberapa sumber menjelaskan mengenai definisi dari pendapatan, para ahli memiliki definisi yang berbeda dari pendapatan.

Samryn (2014:07) menjelaskan bahwa pendapatan merupakan hasil monitor dari pengalihan hak atau barang jasa melalui transaksi penjualan kepada pelanggan. Sedangkan menurut Kieso, Warfield dan Weygandt (2011:955) mendefinisikan pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan perusahaan dalam satu periode. Pendapatan timbul dari peristiwa ekonomi antara lain penjualan barang, jasa, penggunaan aktiva perusahaan, pihak lain yang menghasilkan keuntungan, royalti dan deviden. Pendapatan merupakan jumlah yang dibebankan kepada langganan atas barang dan jasa yang di jual. Oleh karena itu perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh pendapatan yang diharapkan. Menurut Hery (2013:26) pendapatan merupakan arus aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (kombinasi dari keduanya) dari pengirim barang, penerima barang, pemberian jasa atau aktiva lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Secara konseptual pendapatan dapat diartikan aliran masuk aktiva atau pengurangan hutang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada para pelanggan, Samryn (2014:45). Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas perusahaan dalam suatu periode.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, belanja adalah semua pengeluaran rutin dari rekening kas umum yang menguraikan ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran. Sedangkan menurut Siregar (2017:32) belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintah SAP menyatakan belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Definisi lain berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, Belanja dikelompokkan menjadi:

METODOLOGI

Lokasi penelitian ini Pemerintah Kota Kendari. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk memperoleh gambaran terkait objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data berupa laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Kendari mulai tahun 2017 sampai tahun 2021. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif deskriptif yaitu data yang sudah diolah dan diterbitkan atau digunakan oleh suatu lembaga atau instansi yang berkaitan dengan judul penulisan ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa dokumentasi, dimana dapat diperoleh melalui dokumen atau data berupa struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Kendari, Visi dan Misi, Fungsi dan Tugas, dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2017-2021.

Metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif. Proses analisa data dimulai dengan mengembangkan data-data yang telah didapatkan di lapangan. Data laporan keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Kendari dalam bentuk laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dianalisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan daerah sebagai berikut:

1. Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan dan Belanja Daerah. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan. Maka semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas lebih berfokus pada pencapaian hasil (outcome). Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti kinerja semakin buruk (Yulianti, 2015). Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (yang ditetapkan).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690. 900-327 tahun 1996, kriteria anggaran belanja sebagai berikut :

- 100% Sangat Efektif
- 90% - 100% Efektif
- 80% - 90% Cukup Efektif
- 60% - 80% Kurang Efektif
- < 60% Tidak Efektif

2. Analisis Efisien Belanja. Tingkat efisien diukur dengan cara membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisien anggaran jika rasio efisien nya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2007:152). Efisien Belanja diukur dengan Rumus:

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Semakin rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti kinerja semakin buruk (Yulianti, 2015). Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan antara realisasi pendapatan PAD dengan target penerimaan PAD (yang ditetapkan). Abdul Halim (2007:169) menyatakan bahwa efektivitas diukur dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Tabel 1. Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017

Uraian	Perencanaan	Realisasi	Selisih	
			Rp.	%
Pendapatan	1.305.626.558.891	1.131.987.995.497	173.638.563.394	86,7
Pendapatan Asli daerah	408.475.410.745	218.340.628.965	190.134.781.780	53,5
Pendapatan transfer	895.951.148.146	910.944.393.536	- 14.993.245.390	101,7
Pendapatan lain-lain yang sah	1.200.000.000	2.702.972.996	- 1.502.972.996	225,2
Belanja	1.310.022.376.902	1.124.652.357.038	185.370.019.864	85,8
Belanja Operasional	911.631.149.535	819.014.994.657	92.616.154.878	89,8
Belanja Modal	395.590.531.967	305.620.362.381	89.970.169.586	77,3
Belanja Tak Terduga	2.800.289.000	17.000.000	2.783.289.000	0,6
Transfer	406.400	-	406.400	-
Pembiayaan	4.395.818.011	4.424.358.011	- 28.540.000	100,6
Penerimaan Pembiayaan	8.394.818.011	8.423.358.011	- 28.540.000	100,3
Pengeluaran Pembiayaan	3.999.000.000	3.999.000.000	-	100,0

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pendapatan diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran yang ditetapkan sehingga tingkat efektif anggaran yang dicapai sebesar 86,7% yang berarti untuk tahun 2017 efektivitas pendapatan daerah Pemerintah Kota Kendari dikatakan cukup efektif. Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi belanja diatas dapat diketahui

bahwa realisasi belanja daerah lebih kecil dibandingkan target anggaran yang ditetapkan sehingga tingkat efisien anggaran belanja yang dicapai sebesar 85,8% yang berarti untuk tahun anggaran 2017 dikatakan cukup efisien. Adapun belanja daerah badan pengelola keuangan daerah Kota Kendari telah dituangkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 yang dipergunakan untuk membiayai Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer dengan masing-masing tingkat rasio efisien sebesar 89,8%; 77,3%; 0,6%; dan 0,00%.

Tabel 2. Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017

Uraian	Perencanaan	Realisasi	Selisih	
			Rp.	%
Pendapatan	1.447.056.236.889	1.232.806.862.310	214.249.374.579	85,2
Pendapatan Asli daerah	313.111.078.549	176.116.069.072	136.995.009.477	56,2
Pendapatan transfer	1.091.608.688.340	1.014.798.129.033	76.810.559.307	93,0
Pendapatan lain-lain yang sah	42.336.470.000	41.892.664.205	443.805.795	99,0
Belanja	1.454.009.539.709	1.220.315.637.553	233.693.902.156	83,9
Belanja Operasional	951.838.774.461	831.979.928.569	119.858.845.892	87,4
Belanja Modal	499.962.117.448	387.945.973.983	112.016.143.465	77,6
Belanja Tak Terduga	2.208.647.800	389.735.000	1.818.912.800	17,6
Transfer	1.306.693.650	1.306.693.650	-	100,0
Pembiayaan	8.259.996.470	8.291.908.470	- 31.912.000	100,4
Penerimaan Pembiayaan	11.759.996.470	11.791.908.470	- 31.912.000	100,3
Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000	3.500.000.000	-	100,0

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pendapatan diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran yang ditetapkan sehingga tingkat efektif anggaran yang dicapai sebesar 85,2% yang berarti untuk tahun 2018 efektivitas pendapatan daerah Pemerintah Kota Kendari dikatakan cukup efektif, kemudian perhitungan rasio efisien belanja diatas dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah lebih kecil dibandingkan target anggaran yang ditetapkan sehingga tingkat efisien anggaran belanja yang dicapai sebesar 83,9% yang berarti untuk tahun anggaran 2018 dikatakan cukup efisien. Adapun belanja daerah badan pengelola keuangan daerah kota kendari telah dituangkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 yang dipergunakan untuk membiayai Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer dengan masing-masing tingkat rasio efisien sebesar 87,4%; 77,6%; 17,%; dan 100%.

Tabel 3. Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Kendari Tahun 2019

Uraian	Perencanaan	Realisasi	Persentase	
			Rp.	%
Pendapatan	1.601.596.603.012	1.315.811.113.184	285.785.489.828	82,2
Pendapatan Asli daerah	460.227.752.939	215.325.548.788	244.902.204.151	46,8
Pendapatan transfer	1.084.016.050.073	1.045.975.619.996	38.040.430.077	96,5
Pendapatan lain-lain yang sah	57.352.800.000	54.509.944.400	2.842.855.600	95,0
Belanja	1.774.413.384.999	1.295.922.705.651	478.490.679.348	73,0
Belanja Operasional	974.562.482.510	856.140.748.310	118.421.734.200	87,8
Belanja Modal	798.529.502.489	439.346.343.141	359.183.159.348	55,0
Belanja Tak Terduga	1.321.400.000	435.614.200	885.785.800	33,0
Transfer	1.270.390.128	1.270.388.958	1.170	100,0
Pembiayaan	174.087.172.114	10.005.137.497	164.082.034.617	5,7
Penerimaan Pembiayaan	185.087.172.114	19.476.442.497	165.610.729.617	10,5
Pengeluaran Pembiayaan	11.000.000.000	9.515.644.000	1.484.356.000	86,5

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pendapatan diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran yang ditetapkan sehingga tingkat efektif anggaran yang dicapai sebesar 82,2% yang berarti untuk tahun 2019 efektifitas pendapatan daerah Pemerintah Kota Kendari dikatakan cukup efektif, kemudian perhitungan rasio efisien belanja diatas dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah lebih kecil dibandingkan target anggaran yang ditetapkan sehingga tingkat efisien anggaran belanja yang dicapai sebesar 87,18% yang berarti untuk tahun anggaran 2019 dikatakan cukup efisien. Adapun belanja daerah badan pengelola keuangan daerah Kota Kendari telah dituangkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 yang dipergunakan untuk membiayai Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer dengan masing-masing tingkat rasio efisien sebesar 90,07%; 79,61%; 0,00%; dan 99,66%.

Tabel 4. Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Kendari Tahun 2020

Uraian	Perencanaan	Realisasi	Persentase	
			Rp.	%
Pendapatan	1.336.546.546.486	1.259.934.479.368	76.612.067.118	94,3
Pendapatan Asli daerah	219.014.583.473	221.823.160.959	2.808.577.486	101,3
Pendapatan transfer	1.070.577.773.013	988.679.243.309	81.898.529.704	92,4
Pendapatan lain-lain yang sah	46.954.190.000	49.432.075.100	2.477.885.100	105,3
Belanja	1.376.450.258.113	1.198.598.921.197	177.851.336.916	87,1
Belanja Operasional	899.564.784.195	835.718.271.520	63.846.512.675	92,9
Belanja Modal	405.136.396.418	303.826.466.558	101.309.929.860	75,0
Belanja Tak Terduga	71.749.077.500	59.054.183.219	12.694.894.281	82,3
Transfer	-	-	-	-
Pembiayaan	39.903.711.627	39.914.147.945	10.436.318	100,0
Penerimaan Pembiayaan	41.723.156.072	41.733.592.390	10.436.318	100,0
Pengeluaran Pembiayaan	1.819.444.445	1.819.444.445	-	100,0

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pendapatan diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran yang ditetapkan sehingga tingkat efektif anggaran yang dicapai sebesar 86,7% yang berarti untuk tahun 2020 efektivitas pendapatan daerah Pemerintah Kota Kendari dikatakan cukup efektif. perhitungan rasio efisien belanja diatas dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah lebih kecil dibandingkan target anggaran yang ditetapkan sehingga tingkat efisien anggaran belanja yang dicapai sebesar 87,18% yang berarti untuk tahun anggaran 2020 dikatakan cukup efisien. Adapun belanja daerah badan pengelola keuangan daerah Kota Kendari telah dituangkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 yang dipergunakan untuk membiayai Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer dengan masing-masing tingkat rasio efisien sebesar 90,07%; 79,61%; 0,00%; dan 99,66%.

Tabel 5. Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Kendari Tahun 2021

Uraian	Perencanaan	Realisasi	Persentase	
			Rp.	%
Pendapatan	1.576.024.403.657	1.391.085.054.986	184.939.348.671	88,3
Pendapatan Asli daerah	488.128.324.489	298.135.724.193	189.992.600.296	61,1
Pendapatan transfer	898.020.693.000	929.652.417.323	31.631.724.323	103,5
Pendapatan lain-lain yang sah	62.889.602.592	45.239.126.080	17.650.476.512	71,9
Belanja	2.039.699.714.714	1.449.741.172.154	589.958.542.560	71,1
Belanja Operasional	1.048.322.553.918	931.274.885.327	117.047.668.591	88,8
Belanja Modal	941.377.160.796	479.912.957.911	461.464.202.885	51,0
Belanja Tak Terduga	50.000.000.000	38.553.328.816	11.446.671.184	77,1
Transfer	-	-	-	-
Pembiayaan	463.675.311.057	179.837.401.883	283.837.909.174	38,8
Penerimaan Pembiayaan	475.476.566.016	194.810.277.129	280.666.288.887	41,0
Pengeluaran Pembiayaan	11.801.254.959	14.972.875.246	3.171.620.287	126,9

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pendapatan diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran yang ditetapkan sehingga tingkat efektif anggaran yang dicapai sebesar 86,7% yang berarti untuk tahun 2021 efektivitas pendapatan daerah Pemerintah Kota Kendari dikatakan cukup efektif, sedangkan perhitungan rasio efisien belanja diatas dapat diketahui bahwa

realisasi belanja daerah lebih kecil dibandingkan target anggaran yang ditetapkan sehingga tingkat efisien anggaran belanja yang dicapai sebesar 87,18% yang berarti untuk tahun anggaran 2021 dikatakan cukup efisien. Adapun belanja daerah badan pengelola keuangan daerah Kota Kendari telah dituangkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 yang dipergunakan untuk membiayai Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer dengan masing-masing tingkat rasio efisien sebesar 90,07%; 79,61%; 0,00%; dan 99,66%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Kendari periode tahun anggaran 2017-2021 jika dilihat dari segi efektifitasnya mengalami fluktuatif. Hasil perhitungan tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019 menunjukkan hasil dengan kriteria cukup efektif, kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan sehingga memenuhi kriteria efektif, dan di tahun 2021 pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Kendari termasuk dalam kategori cukup efektif. Hasil penelitian mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Kendari dari segi efisiensi hasil perhitungan rasio efisiensinya mengalami fluktuatif namun tetap berada di atas angka kriteria yaitu dibawah 100% sehingga rasio efisiensi dinilai tidak baik. Hasil perhitungan tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2018 menunjukkan hasil yang cukup efisien, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan pengelolaan anggaran belanja sehingga hasil perhitungan masuk dalam kriteria efisien, namun di tahun 2020 rasio efektifitas masuk dalam kategori cukup efisien. Dan tahun 2021 hasil perhitungan rasio efisiensi memperoleh nilai dengan kategori efisien.

Pemerintah Kota Kendari pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dari segi efektivitas dapat dikatakan belum sepenuhnya baik, karena realisasi pendapatan masih kurang dari target anggaran, sehingga disarankan ketika dalam tahap Anggaran sebaiknya menurunkan target PAD yang semestinya. Pemerintah Kota Kendari dari segi efisiensi disarankan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya yang masih tidak baik agar menjadi lebih baik. Agar tingkat efisiensi dapat menjadi baik, Instansi harus lebih menekankan lagi biaya-biaya operasionalnya. sehingga jumlah belanja tidak lebih besar dari jumlah pendapatan. Bagi peneliti selanjutnya bisa melakukan analisis efektivitas dan efisiensi dengan menambahkan alternatif alat analisis statistik untuk melihat factor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

REFERENCES

Apriliyana Ina. 2017. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016*. Magelang: Universitas Tidar

- Artanti Nining Yunia. 2010. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)*. (online). (<https://repository.usd.ac.id/15779/>, diakses pada tanggal 01 Desember 2022).
- Azmi Sayid Abdul Rahman. 2017. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Bappeda Litbang Kota Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*. (online) Vol. 14, No 2 (<https://scholar.google.co.id/>, diakses pada tanggal 23 Desember 2022)
- David.2011. *Strategi Peningkatan Penerimaan Asli Daerah melalui pajak daerah* <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3859/Bab%202.pdf?sequence=4>, tanggal akses 28 Desember 2022
- Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jilid 2. Salemba Empat: Jakarta<http://eprints.umm.ac.id/35927/3/jiptumpp-gdl-danisuhend-48876-3-babii.pdf>,

<https://parepos.co.id/2019/10/serapan-apbd-rendah-pengaruhi-kinerja-opd-enrekan/>) Tanggal akses 5 Januari 2023
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Majid Jamaluddin, 2019. *Akuntansi Sektor Publik*.Pustaka Almaida: Gowa-Sulawesi Selatan-Indonesia
- Mardiasmo, 2018.*Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi https://eprints.umk.ac.id/1974/7/Daftar_Pustaka.pdf, diakses tanggal 19 Januari 2023
- Muryanti Kiky. 2017. *Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015*. Wonogiri: Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Nita. 2021. *Analisis Rasio Keuangan dalam Mengukur Kinerja Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2018-2020*. Kendari: Universitas Halu Oleo.
- Pangkey Imanuel. 2015. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. (online) Vol 3, No 4 (<https://scholar.google.co.id/>, diakses pada tanggal 23 Desember 2022)
- Puspitasari Intan. 2018. *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Tekanan Anggaran dan Pengendalian Diri Terhadap Senjangan Anggaran (studi empiris padasatuan kerja perangkat daerah kabupaten Ponorogo)*. Ponorogo: Ekonomi Universitas

Muhammadiyah Ponorogo.

- Rahmayati. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*. Surakarta: IAIN Surakarta
- Rusdi. 2018. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Kendari*. Enrekang: Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
- Sari Maharani Permata. 2019. *Analisis efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang*. Palembang: Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
- Sartika Dewi. 2018. *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Badan Anggaran Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara*. (online). (<https://repository.uinsu.ac.id/5473/>, diakses pada tanggal 01 Januari 2023
- Soraida. 2022. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Sebelum dan Selama Pandemi*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen
- Sukmawati. 2019. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja STKIP Muhammadiyah Enrekang*. Enrekang: Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
- Sumawan dan Sukartha. 2016. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Kinerja Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. FEB Universitas Udayana.
Tanggal Akses 5 Januari 2023
- Undang-Undang No. 23. 2014. *Peraturan Pemerintahan Daerah*.
- Widiyana Anita. 2016. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang*. (online). (<https://scholar.google.co.id/>, diakses pada tanggal 23 Desember 2022)
- Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, 33. Yogyakarta: Pustaka Baru Press